

BAB III

DINAMIKA KONFLIK DARFUR

Bab ketiga ini akan menjelaskan Dinamika terjadinya konflik Darfur, yang mencakup beberapa poin yaitu sejarah Sudan, sebab-sebab terjadinya konflik Darfur, pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Darfur, kemudian perkembangan konflik yang terjadi di Darfur dan dampak yang terjadi akibat adanya konflik Darfur.

A. Sejarah Sudan

Nama “Sudan” berasal dari bahasa Arab “Bilad As Sudan” yang berarti “Land of Black”, wilayahnya terbentang dari Laut Merah hingga pantai lautan Atlantik. Wilayah Sudan seperti yang ada sekarang yaitu merupakan batas-batas yang dibuat untuk kepentingan penjajah dan bukan perbatasan alamiah. Penduduk di bagian utara Afrika atau Mesir adalah penduduk kulit hitam di sepanjang Sungai Nil pada Millenium Ketiga sebelum Masehi yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat Nubia. Mesir yang lebih dominan daripada penduduk Nubia di bidang militer sehingga menguasai wilayah Nubia hingga ke Selatan.

Pada abad ke-6 missionaris Kristen memasuki Sudan dari Mesir, namun penyebaran agama ini terdesak oleh Nubia-Arab yang muslim. Agama Kristen tumbuh dan berkembang pada abad ke-18-19 dan dapat bertahan diwilayah Sudan Selatan hingga sekarang. Pada abad ke-18, Mesir termasuk juga Sudan adalah merupakan wilayah kemaharajaan Turki Othman. Setelah Turki surut dari Mesir

pada akhir abad itu, muncul Inggris sebagai penguasa baru di Mesir dan Sudan. Keinginan untuk memerdekakan diri yang kuat, mendorong pejuang-pejuang Sudan pimpinan Ahmed El-Mahdi mengadakan perlawanan dan berhasil mengusir Mesir dan Inggris pada tahun 1885. Namun pada tahun 1899, Sudan direbut kembali. Perjuangan rakyat Sudan untuk mengusir penjajah Mesir dan Inggris yang semakin meningkat mendorong Mesir dan Inggris untuk membuat perjanjian tentang kemerdekaan Sudan dan penyelenggaraan pemilu untuk memilih partai politik sebagai embrio Negara Sudan. Pada bulan Januari 1954 dilaksanakan Pemilu untuk pertama kalinya di Sudan dan dimenangkan oleh Natonal Unionist Party (NUP) pimpinan Ismail El Azhari yang selanjutnya menjadi presiden pertama Sudan 1 Januari 1956.

Pertentangan antar kelompok mendorong Jenderal Ibrahim Abboud melakukan kudeta dan menjadi Presiden Kedua hingga menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan transisi dibawah pimpinan El Khatim El Khalifa pada tahun 1964. Selanjutnya Khalifa menyerahkan kekuasaan pada pemenang pemilu kedua yaitu Umma Party dan National Unionist Party (NUP) yang masing-masing dipimpin oleh Sadiq El Mahdi sebagai Perdana Menteri dan Ahmed Mighfani sebagai Presiden (1966). Pemerintahan parlementer tersebut berakhir ketika Jenderal Ja'far Nimeiri melakukan kudeta pada bulan Mei 1969 dan memerintah Sudan hingga tahun 1985. Pertentangan antara kelompok utara dan selatan terus berlanjut dan mereda setelah tercapai persetujuan damai Addis Ababa tahun 1972 dan Sudan Selatan memperoleh Otonomi.

Pada tahun 1983 Nimeiri memberlakukan hukum islam dan ini di tentang oleh rakyat Sudan Selatan yang mayoritas memeluk Animisme dan Kristen. Selanjutnya Jenderal Abdel Rahman El Dahab melakukan kudeta pada April 1985. El Dahab selanjutnya menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu ketiga yaitu Umma Party dan Democratic Unionist Party. Sejak saat untuk kedua kalinya Sudan menganut system Parlementer di bawah PM Sadiq Al Mahdi dan Presiden Ali Ahmed Mighfani (1986-1989). Pemerintahan koalisi ini tidak dapat menyelesaikan konflik politik dan memadamkan pemberontakan rakyat Sudan Selatan pimpinan Jhon Garang de Mabior. Konflik ini nyaris menghancurkan Sudan, Brigjen Omar Hassan Ahmed El Bashir yang didukung oleh sejumlah perwira muda serta National Islamic Front (NIF) pimpinan DR. Hassan Abdalla Turabi melakukan kudeta tak berdarah pada 30 Juni 1989. Kudeta tersebut menghantarkan Omar Hassan Ahmed El Bashir ke puncak kekuasaan hingga sekarang.

1. Sistim politik dan pemerintahan

a. Konstitusi

Konstitusi pertama Sudan dibuat tanggal 12 April 1973, dalam era pemerintahan Presiden Ja'far Nimeiri, namun pada tahun 1985 dibekukan oleh Jenderal Abdurrachman Suer El Dahab (menteri pertahanan) yang mengkudeta presiden Nimeiri. Konstitusi baru terbentuk setelah Presiden El Bashir di angkat. Sebelum konstitusi lama dibubarkan, Dewan Komando Revolusi Penyelamat Rakyat (Al Inzaq Al Wathan) menyusun konstitusi baru yang berdasarkan

Syariah Islam sebagai Sumber hukum dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tanggal 30 Juni 1998 presiden El Bashir memberlakukan konstitusi baru setelah mendapatkan dukungan rakyat melalui referendum pada bulan Mei 1998.

b. Sistim Pemerintahan

Menurut Bab I pasal 2 konstitusi baru 1998, disebutkan bahwa Republik Sudan adalah Negara Federal dan menganut sistim pemerintahan Presidnsiil. Sumber hukumnya adalah Hukum Islam (Syari;ah), konstitusi dan consensus nasional. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh 2 orang Wakil Persiden, dan menteri-menteri yang seluruhnya bertanggung jawab kepada Presiden. Bab IV pasal 108, mengatur tentang pembagian Sudan menjadi 26 negara bagian atau propinsi yang dikepalai oleh Wali atau Gubernur. Pembagian wilayah tersebut dimaksudkan untuk memeransertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Sudan.

c. Dewan Menteri

Dewan Menteri merupakan lembaga eksekutif, yang berwenang menetapkan peraturan pemerintah dan keputusan Presiden. Keputusan yang di ambil di dasarkan atas musyawarah atau suara mayoritas melalui voting.

d. Sistim Kepartaian

Persiden El Bashir membubarkan seluruh partai politik dan untuk menampung aspirasi politik masyarakat dibentuk Kongres Nasional yang kemudian menjadi partai yang berkuasa yaitu Partai Kongres Nasional dan diketuai oleh El Bashir dan Dr. Abdalla Turabi sebagai Sekjen. Namun pendirian NCP tersebut mengundang antisipasi terhadap Presiden dan untuk menghindari dualism kepemimpinan maka Presiden El Bashir mengeluarkan Dekrit yang membubarkan parlemen serta menghentikan Turabi sebagai sekjen PKN. Turabi kemudian mendirikan partai lain yaitu Partai Kongres Rakyat Nasional dan bersama-sama dengan kelompok oposisi lain mengkritisi pemerintah. Kemudian El Bashir memberlakukan UU Organisasi Politik pada tahun 1999 yang menjamin kebebasan rakyat menyalurkan aspirasi politik mereka dan UU Pemilihan Umum untuk pemilihan Anggota Parlemen dan Presiden.

e. Sistim Peradilan

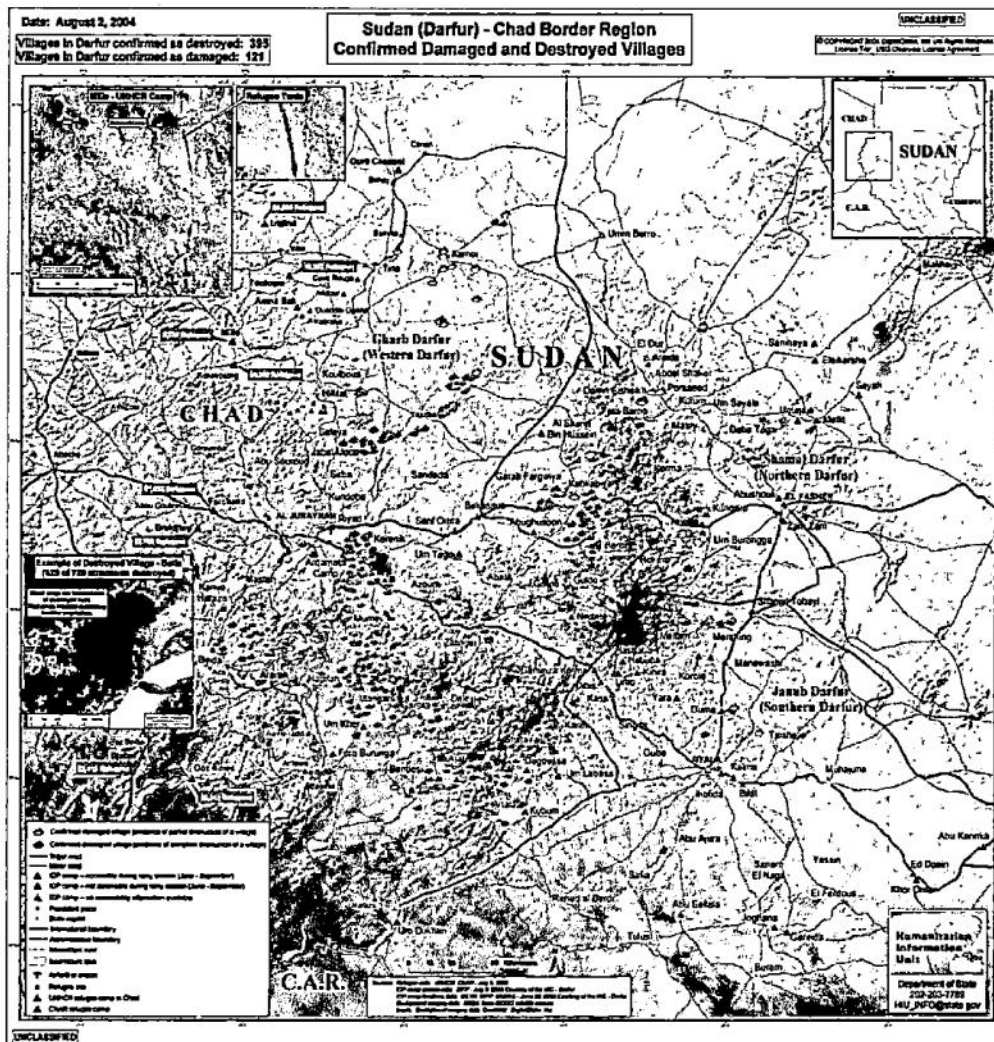
Dalam UU nomer 13 tahun 1994 menyebutkan bahwa sistim peradilan Sudan adalah independen. Praktek peradilan dilakukan oleh para hakim yang tergabung dalam Dewan Kehakiman. Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan tersebut bertanggung jawab pada Presiden. Lembaga peradilan Sudan terdiri atas tiga macam yaitu: yang pertama Mahkamah Juz'iyah Madaniah, yaitu peradilan yang

mengurus perkara perdata, yang kedua Mahkamah Juz'iyah Al Jinaiyah, yaitu pengadilan yang mengurus perkara pidana, dan yang terakhir Mahkamah Juz'iyah Syari'ah yaitu pengadilan yang mengurus perkara hukum islam seperti masalah perkawinan dan warisan.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Darfur

Darfur merupakan seperlima wilayah Sudan yang berpenduduk lebih kurang 4 juta jiwa yang terletak di Sudan bagian barat, berbatasan dengan negara Chad dan Libya, wilayah Darfur dibelah oleh Gunung Marra yang memiliki banyak curah hujan, kaya cadangan minyak, dan lebih subur dibandingkan dengan wilayah lain di Sudan. Di propinsi Darfur, yaitu wilayah negara Sudan bagian barat adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk paling beragam. Sudan merupakan sebuah negara yang berada di sebelah utara benua Afrika, didominasi oleh dua kelompok besar masyarakat, yaitu masyarakat Arab dan masyarakat Afrika.

Gambar 1: Peta Negara Sudan²⁷



Darfur adalah sebuah daerah di Sudan bagian barat yang berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Chad. Darfur dibagi menjadi tiga negara bagian federal di Sudan. Gharb Darfur (Darfur Barat), dengan ibukota Al-Jenina, Janub Darfur (Darfur Selatan) dengan ibukota Nyala, dan Syamam Darfur (Darfur Utara) dengan ibukota Al-Fashir. Darfur meliputi wilayah yang luasnya terdiri lebih dari 2,5 juta km² dengan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa, yang terdiri

²⁷ http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/darfur_villages_0802_2004.jpg (di akses pada tanggal 20 Februari 2010)

dari 80 suku yang dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu kelompok Arab dan kelompok Afrika hitam. Penduduk Darfur mayoritas beragama muslim dan terbagi dalam kurang lebih 80 suku yang di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu kelompok Arab dan kelompok Afrika hitam. Seluruh suku itu berbaur di 26 negara bagian yang mempunyai otonomi yang cukup besar, karena Sudan menganut sistem pemerintahan federal.

Penduduk Darfur mayoritas beragama islam dan terbagi dalam kurang lebih 80 suku yang dikelompokkan secara garis besar menjadi²⁸:

1. Yang pertama yaitu kelompok Arab, disebut jua Baggara, terdiri dari suku Rizaigad, Mahariya, Irayqat, dan Habaniya. Mereka kebanyakan kaum pendatang pada abad ke-13, kemudian menetap di Darfur Utara dan Darfur Selatan, sebagai peternak atau penggembala sapi dan kambing yang berpindah – pindah.
2. Yang kedua yaitu kelompok non Arab, yang disebut Afrika hitam, terdiri dari suku Fur (yang paling besar komunitasnya) dan Zaghawa (yang paling terlatih secara militernya) dan suku Massalit, Tunjur, Bergiddan berti. Pada umumnya mereka mendiami Darfur Tengah dan Darfur Barat.

Hubungan antar etnis ini sering diwarnai konflik, faktor yang menjadi pemicu konflik adalah masalah kepemilikan tanah dan akses ke sumber air dari Jabbal Marra. Pada fase ini konflik yang ada tidak berdimensi etnik tetapi lebih kepada konflik tradisional. Pada masa pemerintahan Shadiq Al Mahdi, etnik

²⁸ Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI: *Profil Negara Sudan*, tertanggal 03 November 2008, hal 3-4 (di akses 04 juli 2010)

Banggara dilatih dan dipersenjatai oleh pemerintah dengan nama milisi Murahiliin untuk menghadapi pemberontak Sudan Selatan (SPLM/A) yang mencoba masuk Darfur. Kerjasama keduanya berlanjut hingga pada kepemimpinan Hassan El-Bashir. Pada tahun 2001, suku Fur, Zaghawa dan Massalit bergabung dan mendapat latihan militer dari Zaghawa yang sebelumnya telah terlatih secara militer dari tentara Sudan dan Chad. Gerakan tersebut mempersenjatai diri dengan senjata yang di beli dan diselundupkan dari Chad dan Libya. Adanya kepemilikan senjata oleh etnis Arab dan etnis Afrika kemudian menamakan dirinya sebagai Front Pembebasan Darfur yang kemudian berubah menjadi (*Sudan People Liberation Movement/Army*) pada Februari 2003 yang mengedepankan Sudan baru yang pro persatuan, demokrasi, sekularisme dan persamaan drajat sebagai warga negara.

Gambar 2: Peta Darfur²⁹



Konflik antar suku bukanlah suatu hal yang baru di wilayah tersebut. Sejarah konflik antar kelompok di Sudan, sudah berakar lama sejak kekuatan Kristen menguasai Sudan sekitar abad-6, dan kemudian dilanjutkan oleh kekuatan Islam dari Kerajaan Ottoman pada abad ke-13. Perebutan pengaruh antar penganut agama yang berbeda itu sampai kini terus menjadi pemisah antar warga Sudan.

²⁹http://www.google.co.id/search?q=peta+darfur&hl=id&biw=1366&bih=705&prmd=ivns&source=lnms&tbnm=isch&ei=t8KTpSMGonNrOeNga2kDw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBsQAUoAQ (di akses pada tanggal 20 Februari 2010)

Berbagai gejolak dalam perpolitikan di Sudan semakin menambah terbengkalainya urusan membangun negara dan mensejahterakan rakyat. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya sejumlah pemberontakan yang dilakukan rakyat, khususnya di wilayah selatan dan barat, terhadap pemerintah pusat. Alasannya, karena kehidupan warga di kedua wilayah itu dirasakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Sebelumnya telah terjadi beberapa kali konflik, namun konflik tersebut dapat diselesaikan oleh rakyat Darfur sesuai dengan mekanisme mereka sendiri. Akar konflik etnis ini bermuara pada faktor – faktor domestik/internal seperti terjadinya bencana kekeringan yang berkepanjangan serta terjadi perebutan sumber daya alam diantara suku – suku yang berada di wilayah Sudan, yang menyebabkan adanya konflik lama yang sudah terjadi puluhan tahun diantara suku – suku yang berkaitan dengan tanah, padang gembalaan, dan juga masalah air³⁰.

Kemudian adanya faktor marjinalisasi Darfur oleh pemerintah pusat di Khartoum dengan beberapa daerah serta perebutan wilayah pertanian dan terjadinya ketidakadilan yang mendorong lahirnya pemberontak yang dikenal dengan DLF atau *Darfur Liberations Front* yang merupakan cikal bakal pemberontak di wilayah Darfur pada tahun 1980-an. Konflik Darfur berawal pada tanggal 26 Februari 2003, ketika DLF menyatakan telah melakukan penyerangan terhadap markas pemerintah dikota Golo, Jabal Marra. Mereka menyerang pos-polisi dan konvoi-konvoi militer milik pemerintah di pegunungan Marra. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2003, markas militer milik pemerintah di kota

³⁰ Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI: *Sudan Update*, hal: 10 (tertanggal 20 Agustus 2008) (di akses pada 04 Juli 2010)

Tine yang terletak di perbatasan Chad berhasil direbut. Kemudian DLF ini mengganti namanya menjadi SLM (*Sudan Liberations Movement*) dan mengubah misinya yang semula menuntut pemisahan wilayah Darfur dari Sudan menjadi pembentukan negara persatuan demokratis Sudan yang berdasar persamaan, pembagian kekuasaan, pemerataan pembangunan, pluralisme budaya dan politik, serta kesejahteraan moral dan material bagi seluruh rakyat Sudan. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok pemberontak di Darfur.

Konflik Darfur merupakan konflik etnis, dimana konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan – permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, teritorial antara dua komunitas etnis atau lebih. Yang akhirnya pecah pemberontakan pada Ferbruari 2003, ketika dua kelompok bersenjata yang menamakan dirinya dengan Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) dan Justice Equality Movement (JEM) memulai pemberontakan, kelompok-kelompok ini menyerang kota-kota, fasilitas-fasilitas pemerintah, dan warga sipil di daerah tersebut. Kebanyakan pemberontak tersebut berasal dari komunitas suku Fur dan Zaghawa, mereka menyatakan perlawanan yang mereka lakukan ini di sebabkan karena keterbelakangan dan marginalisasi yang alami alami Darfur³¹. Mereka menuntut persamaan dan penegakan demokrasi serta pemerataan pembangunan.

Dalam hal ini etnis Arab yang telah menguasai pemerintahan Sudan dan berlaku tidak adil dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam sisi perekonomian, pemerintah selalu mengutamakan pembangunan di wilayah utara

³¹ Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI: *Perkembangan terakhir isu-isu yang terkait dengan Sudan (Konflik Darfur)* hal. 03 (di akses pada 01 Juli 2010)

saja, sehingga pengelolaan yang tidak seimbang yang telah dilakukan sejak masa penjajahan hingga sekarang ini menyebabkan terjadinya masalah dan perpecahan antara pemilik tanah dan penggarap. Disamping budaya Afrika, pengaruh budaya Arab juga sangat kental pada keseharian masyarakat Sudan. Hal ini dapat kita lihat seperti bahasa Arab yang dijadikan sebagai bahasa pengantar di Sudan. Pemerintah juga melakukan perlakuan yang berbeda, dengan selalu mengutamakan etnis Arab, dan menciptakan kecemburuan sosial dan ketidakpuasannya terhadap pemerintah sehingga melakukan pemberontakan.

C. Pihak-pihak yang Bertikai dalam Konflik Darfur

Konflik Darfur sudah terjadi selama bertahun – tahun, berawal dari konflik tradisional (perebutan lahan), gerakan kriminal kelompok tertentu dan berkembang menjadi konflik antar etnik (antara etnik Banggara dengan kelompok pemberontak Sudan Selatan). Gerakan tersebut meluas dan menjadi gerakan politik dengan munculnya dua kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (*Justice and Equality Movement*, atau JEM), serta Gerakan Pembebasan Sudan (*Sudaneese Liberation Movement/Army* atau SLM/A) yang melawan pemerintah Sudan. Kelompok ini terdiri dari petani agraris yang kebanyakan adalah orang muslim Afrika Non Arab. Anggota SLM adalah orang-orang Fur, Masalit, serta suku Wagi Zaghawa. Pemberontakan yang melawan pemerintahan Sudan yang mengistimewakan suku Arab berawal pada tahun 2003, dengan dua kelompok pemberontak lokal, JEM dan SLM/A yang menuduh pemerintah telah melakukan deskriminasi antara kelompok Arab dan

Non Arab, serta di anggap mengabaikan kelompok Non Arab. Di pihak lain terdapat Janjaweed atau kelompok militant yang beranggotakan kelompok etnis Arab di Sudan, mereka disokong secara financial dan bantuan lainnya oleh pemerintah Sudan, sehingga dari berbagai aspek Janjaweed lebih unggul daripada SLM / JEM, bahkan seringkali pemerintah Sudan ikut berperan dalam serangan-serangan yang dilancarkan oleh Janjaweed.

D. Perkembangan Konflik Darfur

Dalam perkembangannya, pemerintah Sudan kewalahan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak SLM dan JEM yang menganggap bahwa Pemerintah Sudan telah melalaikan Darfur sebagai bagian dari wilayah Sudan. Sebagai respon terhadap aksi tersebut, kemudian pemerintah Sudan mengambil sebuah kebijakan, dengan mempersenjatai suku-suku Arab di wilayah tersebut yang pro pemerintah (Arab Janjaweed) dan membentuk operasi tentara bombardir udara sebagai bentuk dukungan serangan darat yang dilakukan pasukan sipil Arab Janjaweed, serta mempersenjatai atau memobilisasi milisi tersebut untuk membela diri.

Meskipun pada kenyataannya pemerintah Sudan menolak/membantah keterkaitannya dengan milisi Arab Janjaweed untuk memerangi rakyat Darfur, namun militer Arab Janjaweed dalam beberapa tahun terakhir menerima support, baik dana maupun persenjataan dari pemerintah Sudan dalam usahanya

menumpas penduduk yang di sinyalir tidak loyal terhadap pemerintah³². Pada awal terjadinya konflik Darfur, pemerintah Sudan menyangkal adanya gerakan separatisme, hal ini dilakukan guna mencegah internasionalisasi konflik etnis Darfur dimana pihak asing akan melakukan intervensi dan masuk wilayah Sudan. Salah satu cara yang digunakan pemerintah Sudan adalah dengan mengeksploitasi perbedaan etnik di Darfur. Kemudian Pemerintah Sudan pun membalas setiap penyerangan yang dilakukan kelompok pemberontak. Mereka melakukan penyerbuan, pembunuhan, pembakaran, perampokan, dan pemerkosaan terhadap warga sipil Darfur yaitu etnis non Arab dengan harapan mendapatkan pekerjaan sebagai tentara atau polisi Sudan.

Dukungan pemerintah terhadap pasukan Janjaweed di anggap sebagai perlakuan tindakan kekerasan HAM, termasuk pembunuhan massal, perampasan, serta pemerkosaan terhadap etnis non-Arab di Darfur. Kelompok tersebut seringkali melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah desa, mengakibatkan penduduk melarikan diri ke kamp-kamp pengungsian di Darfur dan Chad, dan kebanyakan dikepung oleh pasukan Janjaweed. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya pemberontakan penduduk Darfur, sehingga muncul milisi-milisi tandingan untuk melawan Janjaweed.

Konflik Darfur adalah masalah utama yang menonjol di Sudan, karena pihak – pihak yang bertikai hingga saat ini belum mencapai kesepakatan bersama. Perkembangan politik yang terjadi dalam negeri Sudan masih diwarnai oleh beberapa upaya untuk mencari penyelesaian konflik Darfur. Berbekal dukungan

³² Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI: *Bahan masukan untuk pertemuan antara Direktur Jenderal ASPASAF KEMENLU RI dengan Duta Besar Sudan*. Jakarta, 2008 hal 5(di akses pada 01 Juli 2010)

dari Uni Afrika (AU), Liga Arab (LA), forum regional, dan internasional seperti PBB, pemerintah Sudan tengah berupaya untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat Darfur, termasuk seluruh pihak signatories DPA serta parpol dan fraksi non-signatories DPA untuk turut menyelesaikan permasalahan di Darfur.

E. Dampak Konflik Darfur

Hingga saat ini, yaitu pada tahun 2003 – 2008, konflik yang terjadi di Darfur telah menewaskan kurang lebih 300 - 400 ribu jiwa dan mengakibatkan sekitar 2,5 juta orang mengungsi ke negara – negara tetangga. Sebagai dampak dari kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah Sudan, pemerintah Sudan menerima banyak sekali kecaman dari masyarakat internasional. Isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional, karena sejak munculnya konflik Darfur pada awal 2003, WHO memprediksikan sekitar 400 ribu orang meninggal dalam konflik Darfur dan 2,5 juta penduduk Darfur menjadi pengungsi³³.

Banyaknya korban dalam konflik Darfur tidak terlepas dari aktivitas milisi-milisi bersenjata. Berdasarkan data Human Right Wacth (HRW) dan berdasarkan keterangan dari sejumlah NGO seperti Amnesty Internasional, tindakan milisi Janjaweed di dukung oleh pemerintah Sudan³⁴. Pemerintah Sudan telah berusaha secara maksimal untuk mengupayakan penyelesaian konflik Darfur, baik dengan melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok

³³ Dokumentasi kementerian luar Negeri RI: *Perkembangan Terakhir Isu-Isu Yang Terkait Dengan Sudan (Konflik Darfur)*, tertanggal 21 Oktober 2008 (di akses pada 04 Juli 2010)

³⁴ Vide Brafaks KBRI No: BB-25/KHARTOUM/III/06. Sub. Direktorat Timur Tengah. Bulan Juni 2006 hal 7 (di akses pada 01 Juli 2010)

pemberontak, namun secara umum situasi keamanan di Darfur dan sekitarnya masih rentan.

Sejak tahun 2004, pemerintah Sudan telah dituduh melanggar Hak Asasi Manusia di negaranya sendiri, dengan mempersenjatai milisi Arab Janjaweed dalam konflik antar etnis yang terjadi di Darfur hingga menimbulkan angka korban jiwa yang sangat tinggi dan membuat masalah tersebut menjadi isu internasional serta adanya isu *Genocide* telah menyita perhatian dunia terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Organisasi Internasional yang sangat memperhatikan persoalan-persoalan sosial seputar kemanusiaan.

PBB menyebut kondisi di Sudan sebagai situasi darurat internasional dan meminta perhatian penuh dari negara-negara lain untuk melindungi warga sipil yaitu para saksi yang terlibat dan masih bertahan dari konflik yang tengah terjadi. Konflik ini bukan lagi menjadi konflik internal, karena telah merambah ke beberapa negara tetangga dengan adanya pengungsi-pengungsi yang melarikan diri ke Chad ataupun Libya. Sulitnya pencapaian perdamaian dan besarnya krisis kemanusiaan yang telah terjadi di Darfur, membuat PBB merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap konflik etnis tersebut.

Gambar 3: pengungsi di negara Chad³⁵



Besarnya keinginan PBB dan komunitas internasional untuk dapat mengakhiri konflik etnis di Darfur dapat terlihat dari banyaknya kesepakatan dan pembicaraan tingkat tinggi mengenai Darfur. Pemerintah Sudan sendiri telah menunjukkan niat baik untuk menghentikan konflik etnis di masyarakatnya, dan menginginkan pelucutan senjata serta pengadilan hukum yang sesuai, baik bagi SPLA maupun Janjaweed. Pemerintah Sudan juga menghimbau kepada kelompok-kelompok yang berseteru agar tidak melewati perbatasan nasional dan mengganggu stabilitas negara tetangga, yaitu negara Chad, maupun Libya.

³⁵http://www.google.co.id/search?q=konflik+darfur&hl=id&prmd=ivns&source=lnms&tbn=isch&ei=gUQNTtuuPMnrAei5_SjCw&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CB0Q_AUoAQ&biw=1366&bih=705 (di akses pada 20 April 2011)

Hal lain yang menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah Darfur karena konflik tersebut telah merambah ke negara-negara tetangga Sudan yaitu Chad dan Afrika Tengah sehingga hubungan Sudan dan Negara-negara tersebut semakin memburuk. Janjaweed turut terlibat dalam perang sipil di Chad yang berawal pada tahun 2005, ketika Presiden Chad yaitu Idris Deby mengganti konstitusi pemerintahan agar dia bisa ikut pemilihan Presiden untuk yang ketiga kalinya, dan hal ini mengundang banyak protes dari berbagai kalangan. Kemudian pada tahun 2004 kelompok Janjaweed menyerang wilayah penduduk di timur Chad dan penduduk Sudan menerobos perbatasan untuk menduduki wilayah tersebut, sehingga ketegangan antar kedua pemerintah mulai terjadi. Ketegangan itu meningkat ketika Janjaweed mendukung gerak-gerik kelompok pemberontak Chad. Sedangkan Negara Chad juga merupakan negara tempat tujuan para pengungsi serta korban konflik Darfur. Keterlibatan Janjaweed di dalam perang sipil di Chad berpengaruh terhadap memburuknya hubungan diplomasi antara Sudan dengan Libya, karena Sudan adalah negara yang mendukung gerakan kelompok pemberontak, sedangkan Libya adalah negara yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perang sipil di Chad³⁶.

³⁶ <http://bataviase.co.id/node/90758> (di akses pada 06 Juli 2010)